

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu bangsa pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap bangsa dalam mewujudkan tercapainya tujuan nasionalnya. Pembangunan nasional oleh karenanya merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional oleh suatu bangsa mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mencapai pembangunan secara benar, adil dan merata maka diperlukan suatu strategi pembangunan yang melibatkan semua perangkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembiayaan pembangunan selanjutnya tidak terlepas dari perlunya dukungan sumber daya-sumber daya yang memadai yang dapat diperoleh secara mandiri dari semua potensi sumber daya-sumber daya yang ada di seluruh wilayah RI. Oleh karena itu, pada tingkat Pemerintah Daerah sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang sejak lama telah menjadi unsur PAD utama bagi setiap daerah.

Adapun setiap tahunnya rencana pembangunan daerah khususnya pada pemerintahan daerah, bupati selaku kepala pemerintahan berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBD kepada DPRD. RAPBD tersebut memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBD, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit/surplus, pembiayaan defisit serta kebijakan pemerintah. Selain itu APBD juga memuat perkiraan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran setiap SKPD, proyek, data aktual, proyeksi perekonomian, dan informasi terkait lainnya. Dalam pelaksanaan selanjutnya, apa yang telah tertuang dalam APBD sebelumnya selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan ini menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting

dalam mengatur stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Namun dalam kenyataannya masih banyak ketimpangan yang terjadi seperti yang diterangkan oleh menteri keuangan RI Ibu Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama komisi XI DPR di komplek parlemen, senayan, jakarta, senin (15/03/2021) mencermati masih banyaknya belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang buruk. Hal ini berakibat pada capaian *output* dan *outcome* pembangunan daerah yang sangat timpang. Padahal, pemerintah telah membuat formulasi untuk mengurangi ketimpangan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah lewat transfer ke daerah (TKD). Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota komisi XI DPR Marinus Gea yang menerangkan bahwa ada sebuah formulasi baru dalam rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU HKPD) yang diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sangat rendah.

Kemudian dilihat dari penelitian Dewi Hasmayna (2019), realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang dilihat dari realisasi anggaran (LRA), Laporan ini menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Namun dalam kenyataannya selalu saja bahwa pertama realisasi pendapatan dalam beberapa tahun (studi kasus pada pemerintah daerah Aceh Tengah) belum

dapat mencapai target anggaran. Kedua anggaran belanja mengalami peningkatan setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan realisasi. Kondisi ini membuat kita mempertanyakan bagaimana sebenarnya kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Provinsi Aceh Tengah.

Dalam pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target yang harus dicapai. Jika pendapatan melebihi target tersebut, maka akan berdampak positif bagi daerah tersebut, dan sebaliknya jika pendapatan tidak mencapai target tersebut, maka berdampak buruk bagi daerah dan perlu dievaluasi penyebab kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan (Budi,dkk 2016).

Berdasarkan tugas pokok BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat digambarkan bahwa tugas pokok Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Kupang adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dimana terdapat beberapa fungsi yang diantaranya, fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis keuangan daerah dibidang pendapatan, penganggaran, pajak, retribusi, perbendaharaan, aset daerah, akuntansi dan pelaporan.

Capaian kegiatan dan berbagai pelaksanaan tugas berupa kegiatan pendapatan, penagihan, penetapan dan pelayanan serta kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak secara terus menerus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak.Semua kegiatan tersebut setiap bulan dilaporkan secara berjenjang dan berkala sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap indikator kinerja

UPTD. Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga membawa dampak bagi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berikut dapat dilihat target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Wilayah Kabupaten Kupang
Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Presentase Capaian (%)
2018	25.784.961.449	27.649.963.783	1.865.002.334	107,23
2019	30.987.294.176	30.695.409.461	(291.884.715)	99,06
2020	35.074.852.918	23.957.819.492	(11.117.003.426)	68,30

Sumber: *UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang, 2021*

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat, target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020 masih belum terealisasi dengan baik, dimana Pada tahun 2018 pemerintah setempat berupaya menaikkan target dari tahun sebelumnya dan perkembangannya naik menjadi 107,23% dan pada tahun 2019 yang ditargetkan senilai Rp.30.987.294.176 dan realisasinya malah mengalami penurunan menjadi Rp.30.695.409.461, begitupun ditahun 2020 dimana yang ditargetkan Rp.35.074.852.918 namun realisasinya mengalami penurunan yang drastis menjadi Rp.23.957.819.492. Sehingga sangat menarik untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang pada tahun 2018 dikarenakan

adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendarann bermotor yang mereka miliki sehingga pendapatan asli daerah meningkat, sedangkan ditahun 2019-2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun dikarenakan kurangnya kesadaran mansyarakat kabupaten Kupang untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah menurun.

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam berupaya mencari strategi apa yang baik digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan menyadarkan pengguna kendaraan sepeda motor untuk membayar pajak kendaraannya, sehingga pajaknya dapat mencapai target yang telah ditentukan pada PAD. Adapun jika realisasi pajak tidak dapat mencapai target maka defisit (berkurangnya kas dalam keuangan).

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Kasus Pada Uptd Samsat Wilayah Kabupaten Kupang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah Kabupaten Kupang tidak mencapai target?
2. Bagaimana upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab realisasi tidak mencapai target pajakyang telah ditentukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas,maka beberapa kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Bagi Pemerintah Daerah/ Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah atau instansi terkait dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Akademik

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu

pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

4. Bagi Mahasiswa dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami tentang perpajakan. Khususnya tentang pajak kendaraan bermotor, bagi para pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan tambahan pengetahuan.